

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan kunci sektor pariwisata dalam pertumbuhan Indonesia disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjabarkan 5 (lima) fokus proyek pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Infrastruktur, Maritim, Energi, Pangan, dan Pariwisata (IMEP)¹. Pariwisata merupakan salah satu dari 5 (lima) industri yang apabila dikelola dan dikembangkan secara efektif dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara.

Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional juga berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata daerah. Hal ini karena pariwisata daerah merupakan bagian dari pariwisata nasional. Sejak desentralisasi dan otonomi ditetapkan, daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang. Demikian pula dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan potensi pariwisata daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dengan manfaat pengelolaan pariwisata yang sedemikian besar bagi suatu daerah, maka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan berorientasi pada pertumbuhan

¹Kementerian Pariwisata. 2018. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018. Diakses dari [file:///C:/Users/acer/Downloads/media_1560915745_LAKIP_KEMENPAR_TA_2018%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/media_1560915745_LAKIP_KEMENPAR_TA_2018%20(1).pdf) pada 4 September 2019. Hlm 1

ekonomi dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat, serta pembangunan yang berorientasi pada pembangunan daerah, bertumpu pada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi berbagai aspek seperti destinasi, iptek, kerja sama antarnegara, keterkaitan lintas sektor, pemasaran, pemberdayaan usaha kecil, sumber daya manusia, dan tanggung jawab dalam penggunaan sumber kekayaan alam dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, menurut Argo Demartoto² proses pengelolaan pariwisata sendiri mempunyai dua bentuk pengelolaan yaitu *Community Based Tourism* atau CBT dan Pengelolaan Pariwisata Top Down. Pengelolaan pariwisata berlandaskan masyarakat didasarkan pada konsep kesepadanan dan kesesuaian antara kepentingan para *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Idealnya, gagasan *Community Based Tourist*, atau CBT, merupakan interpretasi dari konsep pengembangan pariwisata yang diamanatkan UU Kepariwisataan. Pendekatan pengelolaan wisata ini dipusatkan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena tujuan akhir yang ingin dicapai meliputi menyejahterakan taraf hidup masyarakat maka masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari kegiatan merencanakan, membangun, mengelola, mengembangkan, dan monitoring, serta melakukan penilaian.

²Argo Demartoto. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS

Masyarakat sebagai aktor utama dalam penciptaan *Community Based Tourism*, terlibat dalam setiap langkah, bertindak sebagai evaluator, investor, pelaksana, pemantau, pengelola, dan sekaligus perencana. Meskipun pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menitikberatkan masyarakat sebagai aspek utamanya, tetapi kerjasama dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan swasta juga dibutuhkan. Masyarakat setempat atau masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi wisata, sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata di wilayahnya.

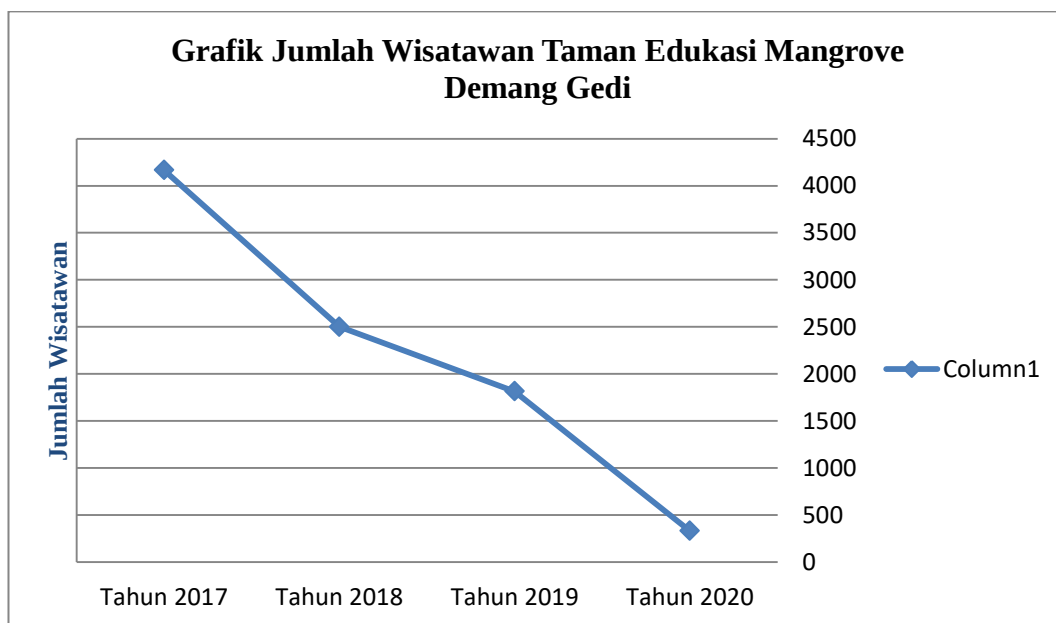
Salah satu bentuk pengelolaan pariwisata CBT terdapat di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo sendiri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan potensi pariwisata khususnya wisata alam, budaya, religi dan kuliner karena letaknya yang dibatasi oleh Pegunungan Serayu di sebelah selatan, dan Gunung Sumbing di sebelah utara, serta pegunungan menoreh di timur dan Samudra Hindia di selatan dan dataran Kebumen-Banyumas di sebelah barat. Kabupaten Purworejo terletak pada posisi 109^o 47'28" – 110^o 8'20" Bujur Timur dan 7^o 32' – 7^o 54' Lintang Selatan³. Dengan terlalu banyaknya potensi pariwisata yang ada, dan pengelolaan yang dikuasai oleh pemerintah terbatas sehingga beberapa potensi pariwisata ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat menjadi obyek pariwisata dengan bentuk *Community Based Tourism* atau yang lebih sering dikenal dengan pengelolaan desa wisata. Salah satu bentuk pengelolaan pariwisata *Community Based Tourism* atau CBT di

³Kuncahyawati, H. 2016. Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus: Pasar Krendetan). Yogyakarta: *Skripsi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm 58

Kabupaten Purworejo adalah Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi yang berada di Desa Gedangan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi merupakan obyek wisata yang berdiri di atas tanah milik Desa Gedangan di sepanjang pantai selatan dan merupakan pengelolaan desa wisata pertama yang ada di Kabupaten Purworejo.

Namun sayangnya sebagai pelopor desa wisata di Kabupaten Purworejo, Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi eksistensinya semakin menurun. Berikut merupakan data kunjungan wisatawan Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi sejak tahun 2017:

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Wisatawan Mangrove Demang Gedi Tahun 2017-2020



Sumber: Pemerintah Desa Gedangan, 2021

Alasan apa yang membuat Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi tidak memiliki eksistensi sebaik desa wisata lain dan bagaimana pengelolaan pariwisata *Community Based Tourism* di Taman Edukasi Mangrove Demang Gedi diterapkan serta bagaimana manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat akan menjadi poin penting dalam penelitian ini.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan obyek wisata Mangrove Demang Gedi yang dikelola berdasarkan bentuk CBT, sejauh mana peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di obyek wisata Mangrove Demang Gedi. Serta bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat disekitar obyek pariwisata Mangrove Demang Gedi dengan bentuk pengelolaan CBT. Maka judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah “*Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Pariwisata Mangrove Demang Gedi di Kabupaten Purworejo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut dikemukakan dalam bentuk pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan pariwisata Mangrove Demang Gedi yang dilakukan melalui konsep *Community Based Tourism*?
2. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitar obyek wisata Mangrove Demang Gedi dengan bentuk pengelolaan pariwisata yang diterapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pengelolaan pariwisata Mangrove Demang Gedi yang diterapkan melalui CBT di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mendeskripsikan manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitar obyek pariwisata dengan adanya pola pengelolaan pariwisata yang diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang ilmu sosial dan politik, serta masyarakat umum dan kalangan yang berkompeten khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Daerah

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di Bidang Pariwisata, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata.

b. Bagi mahasiswa

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan pengalaman, khususnya

dalam pemerintah daerah dan analisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah.

c. Bagi masyarakat

Temuan studi ini dimaksudkan untuk membuka wawasan baru kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di Bidang Pariwisata yang berdampak pada masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang melibatkan eksplorasi, pengamatan, pemeriksaan, dan identifikasi informasi atau objek yang ada untuk meninjau apa yang sudah tersedia dan tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 penelitian sebelumnya dari 5 tahun belakangan untuk menunjang kegiatan penelitian.

Tabel 1. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Fahmi Muhamad	Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat	Penelitian deskriptif kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan teori yang dijadikan sebagai acuan adalah teori mengenai proses pengelolaan pariwisata, pengelolaan pariwisata, dan dampak pengelolaan pariwisata.	Penelitian ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa pantai Pangandaran dikelola dengan bentuk pariwisata <i>community-based tourism (CBT)</i> . Bentuk pengelolaan ini mengedepankan kerja sama antara pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta (investor). Untuk mewujudkan pengelolaan ini, diperlukan proses panjang yang dimulai

				dengan mendidik masyarakat, menyatukan pemikiran, membentuk lembaga pengelola wisata, dan yang terpenting partisipasi secara aktif dari masyarakat. Kemudian, pengaruh pengelolaan potensi wisata pantai Pangandaran sangat bervariasi, dimulai dengan pengaruh sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi yang paling diakui oleh masyarakat pantai Pangandaran sendiri.
2	Resky Sirupang Kanuna	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara	Metode penelitian deskriptif kualitatif Teori Pengertian peranan pemerintah, Pengertian pengelolaan, Pariwisata dan kepariwisataan, Potensi pariwisata, Dinas daerah, Pendapatan asli daerah	Wisata yang dikelola dinas budaya pariwisata telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih ditemukan permasalahan yang berdampak merugikan terhadap pelaksanaan rencana pokok, yaitu penganggaran. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya, Realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Toraja berupa retribusi tempat rekreasi.
3	Sarah Nila Savitri	Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Sapta Pesona Pariwisata di Kabupaten Magetan	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori peranan, stakeholder pariwisata, pengertian pariwisata, sapta pesona, dan sadar wisata	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kabupaten Magetan memiliki potensi pariwisata yang unggul utamanya objek wisata alam, namun penerapan Sapta Pesona Pariwisatanya belum berjalan dengan optimal. Fakta dilapangan menjelaskan bahwa penerapan Sapta Pesona Pariwisata belum berjalan sinergis antara satu dengan yang lain. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung objekwisata

				berdasarkan Sapta Pesona Pariwisata tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena kurangnya kerja sama di antara pemerintah dan masyarakat, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Sapta Pesona Pariwisata masih kurang.
4.	Arfianti Nur Sa'idah	Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif Teori yang digunakan adalah pariwisata (pengertian pariwisata, pariwisata dalam perspektif ekonomi islam, objek dan jenis – jenis pariwisata, sumber daya pariwisata, industri pariwisata, pengembangan pariwisata), pendapatan asli daerah dan pendapatan dalam islam.	Hasil pengujian mengarahkan peneliti pada kesimpulan bahwa pariwisata Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung belum dilakukan secara maksimal, baik dari segi sarana dan prasarana, maupun dari segi jumlah daya tarik wisata. Hal tersebut dikarenakan sampai sekarang Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung tidak mempunyai objek wisata yang dapat dikelola sendiri, melainkan masyarakatlah yang mengelola objek wisata tersebut dan tidak dikenakan retribusi apapun kepada mereka. Namun, karena kontribusi dari sektor pariwisata termasuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, Kota Bandar Lampung terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Industri jasa pariwisata yang meliputi restoran, hotel, dan hiburan menjadi fokus upaya membangun Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung.
5.	Ari Suciati	Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Situs Tasikardi Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan	Penelitian yang dilakukan oleh Ari Suciati menggunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian dianalisis dengan mengambil referensi dari Cox dalam I	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang dalam mengelola objek wisata Situs Tasikardi dinilai kurang optimal karena masih banyak persoalan

		Pariwisata Kabupaten Serang	gde Pitama dan I Ktut Surya Diarta mengenai teori prinsip dasar pengelolaan pariwisata.	yang muncul di lapangan. Pembangunan dan pengembangan objek wisata Situs Tasikardi berjalan sangat lambat, dengan sedikit kemajuan yang terlihat. Hal ini disebabkan oleh Provinsi yang memelihara aset kepemilikan Situs Tasikardi, sedangkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang menjadi pengelolanya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam administrasinya karena fakta bahwa penanggung jawab tidak memiliki hak kepemilikan.
--	--	-----------------------------	---	---

Sumber: Olah Data Dokumen Pribadi, 2019

Meskipun telah banyak penelitian mengenai pariwisata di Kabupaten Purworejo namun penelitian-penelitian tersebut sebagian besar dilakukan untuk mengetahui kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di Kabupaten Purworejo, letak perbedaannya terdapat pada bentuk pengelolaan pariwisatanya, di mana penelitian ini lebih berfokus pada bentuk pengelolaan pariwisata CBT di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata CBT di Kabupaten Purworejo. Serta penelitian ini akan menganalisis bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitar obyek wisata Mangrove Demang Gedi terhadap bentuk pengelolaan pariwisata CBT khususnya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan solusi mengatasi pengangguran sesuai dengan tujuan kepariwisataan nasional.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Desa Wisata

Bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disediakan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku merupakan pengertian dari desa wisata. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pariwisata mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang menggemakan keaslian arsitektur pedesaan, bangunan, dan tata letak desa sekaligus berpotensi dalam pengembangan berbagai aspek pariwisata, seperti kuliner, cinderamata, tempat penginapan, dan kebutuhan lainnya.

Menurut Made Heny, desa wisata adalah jenis wisata di mana sekelompok kecil pengunjung tinggal di atau dekat kehidupan konservatif atau di desa yang tersisih dengan mempelajari mengenai kehidupan desa sekitar⁴. Timor Mahardika berpendapat bahwa proses partisipasi dan pembentukan desa wisata dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan kelembagaan masyarakat lokal melalui proses pembelajaran, dimana masyarakat dilibatkan dalam berbagai aspek pemberdayaan⁵.

Menurut Timor Mahardika (2001:25), pemerintah dan NGO (*non goverment organization*) memainkan tiga peranan dan langkah dalam proses pembentukan desa wisata, diantaranya:

⁴ Made Heny Urmila Dewi. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, Vol. 3 No. 2 hlm 131. Bali : Universitas Udayana.

⁵ Timor mahardika. (2001). *Pendidikan politik pembangunan desa*. Pustaka utama: Yogyakarta.

1. Kesadaran (*conscientization*), agar masyarakat dapat menyadari potensinya untuk mengembangkan desa wisata yang dikuasai oleh masyarakat lokal, terlebih dahulu harus melalui proses penciptaan pemahaman agar dapat berdampak pada tindakan dan kesadaran dalam wujud taktik aksi dan aplikasinya.
2. Mobilisasi Masyarakat (*community mobilization*) merupakan usaha memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kerentanan dan kemampuan mereka, keadaan lingkungan mereka, serta memobilisasi masyarakat untuk bereaksi terhadap persoalan yang ada dan memenuhi kebutuhan mereka melalui optimalisasi ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang signifikan dalam memastikan kelangsungan pembangunan desa wisata dalam jangka panjang.
3. Penghantaran Sumber Daya Manusia, yaitu membantu masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Desa wisata pada umumnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal sekitarnya. Selain itu, pengelolaannya dilatarbelakangi oleh masyarakat sekitar yang berupaya memaksimalkan potensi ketersediaan sumber daya alam, dan juga sumber daya budaya, sejarah, ekonomi, sosial, dan tata letak. Ringkasnya, desa wisata adalah desa berpotensi untuk dikembangkan secara bersamaan oleh pemerintah dan masyarakatnya.

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2009), terdapat 6 isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan desa wisata, diantaranya:

1. *Entrepreneurship* di Masyarakat Pedesaan

Pentingnya membekali para wirausaha di tingkat desa untuk menghadapi pelatihan, kerja sama dengan pihak eksternal, subsidi pemerintah, dan isu-isu lainnya dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat lokal dan menjamin pertumbuhan jangka panjang desa wisata.

2. Barometer Ekonomi

Pertumbuhan desa wisata tidak melenyapkan perekonomian pedesaan. Sebaliknya, hal itu dapat memperkuat ekonomi desa melalui pendapatan yang semakin meningkat dan masyarakat sekitar yang semakin sejahtera.

3. Sumber Daya

- a. Sumber daya manusia dengan pengalaman mengelola dan menawarkan layanan kepada wisatawan;
- b. Media informasi yang mengilustrasikan ciri khas desa merupakan salah satu fasilitas pendukung yang dianggap perlu.

4. Kelestarian

Berupaya agar skala pertumbuhan tidak memberikan pengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan, kekhasan, dan keunikan desa itu sendiri.

5. Integrasi Pariwisata Global

Untuk memperoleh akses pasar wisata sekaligus mendirikan desa wisata, baik atas prakarsa masyarakat maupun atas arahan pemerintah, diperlukan integrasi sistem pariwisata global termasuk pemasaran oleh *tour* dan *travel/tour operator*.

6. Kerangka Lembaga

Untuk menjaga kelangsungan hidup desa wisata, kelembagaan yang memadai dalam penyelenggaraannya harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Untuk menarik calon wisatawan dari berbagai pasar, pengembangan suatu kawasan agar dapat menjadi daya tarik wisata harus memenuhi tiga kriteria, yaitu (Oka Yoeti, 2008: 177):

- a. Sesuatu yang dikenal dengan “*something to be hold*” harus ada di wilayah tersebut. Artinya, sebuah kawasan perlu mempunyai objek wisata yang unik dan tidak dapat ditemukan di tempat mana pun.
- b. Sesuatu yang dikenal dengan “*something to be done*” harus ada di wilayah tersebut. Artinya, setiap lokasi yang terbuka dan terlihat harus mencakup sarana hiburan yang memungkinkan pengunjung merasa nyaman untuk waktu yang lama di lokasi wisata.
- c. Sesuatu yang dikenal dengan “*something to purchase*” harus ada di wilayah tersebut. Wisatawan harus bisa membeli oleh-oleh dan kerajinan tangan yang khas dari lokasi wisata ini sebanyak mungkin.

Ketiga kriteria tersebut sesuai dengan pola tujuan pemasaran kepariwisataan, yaitu meningkatkan jumlah wisatawan ke suatu kawasan, tinggal berlama-lama, dan menghabiskan uang secara berlebihan di lokasi wisata dalam rangka menumbuhkan pendapatan daerah. Persyaratan yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu strategi pengembangan wisata yang harus dipenuhi agar dapat terlaksana secara optimal.

Konsep desa wisata dalam penelitian ini akan digunakan untuk menelaah lebih jauh mengenai kesesuaian pengembangan desa wisata secara konsep dan realitanya yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

1.5.2.2 Peran Pemerintah Dalam Pariwisata

Posisi dalam masyarakat ditentukan oleh sikap suatu pihak terhadap peran yang dilakukan oleh pihak tersebut. Posisi memiliki banyak elemen dinamis, salah satunya adalah fungsi yang dimainkan seseorang di dalamnya. Seseorang dianggap telah melaksanakan suatu fungsi apabila telah melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan posisinya⁶. Dari perspektif yang berbeda, peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mewakili segerombolan individu dalam suatu kejadian⁷. Berdasarkan definisi dan gagasan tersebut, peran dapat didefinisikan sebagai fungsi aklimatisasi yang dilakukan oleh suatu individu, sekelompok orang, ataupun organisasi yang menduduki suatu posisi dalam hierarki sosial. Jika pengertian tersebut dikaitkan dengan kegiatan pemerintahan,

⁶Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 268

⁷Poerwadarminta, WJS. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

maka fungsi aklimatisasi yang dimiliki organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan negara diartikan sebagai peran pemerintah.

Pitana dan Gayatri⁸ mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut andil dalam pengembangan potensi wisata daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Peran serta pemerintah daerah sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan agar sektor pariwisata tetap dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat, pemodal, dan pelaku usaha dalam industri pariwisata menjadi tujuan utama yang seharusnya didorong terus-menerus supaya pengembangan pariwisata meraup kesuksesan.
- b. Fasilitator, tugas pemerintah sebagai fasilitator pertumbuhan potensi wisata yaitu mempersiapkan seluruh sarana yang mendukung semua program pengelolaan wisata yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun oleh masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat dalam praktiknya.
- c. Sebagai dinamisator, di bawah pilar *good governance*, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta harus dapat bekerja sama agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal. Fungsi utama pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata adalah melakukan sinergi terhadap ketiga pihak tersebut agar terjalin hubungan saling menguntungkan satu sama lain untuk pertumbuhan pariwisata.

⁸*op.cit.*, lih (5) hlm 95

Oka A. Yoeti⁹ berpendapat bahwa terdapat 3 faktor mendasar yang dipandang signifikan dan berdampak pada keberhasilan organisasi wisata di suatu kawasan, diantaranya:

1. Perluasan arus lalu lintas pariwisata yang berasal dari pusat-pusat pariwisata, mengakibatkan ketidakmampuan kawasan untuk menyediakan fasilitas yang nyaman dan memadai bagi pengunjung.
2. Dengan meningkatnya kebutuhan daerah, diharapkan industri pariwisata akan berfungsi sebagai akselerator pembangunan dan menghasilkan pendapatan bagi perekonomian lokal, sehingga penting untuk menciptakan lembaga pengelola industri pariwisata yang dapat diandalkan.
3. Jumlah wisatawan telah meningkat pesat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pariwisata milik publik, sehingga penting untuk membentuk organisasi wisata yang akan menumbuhkan layanan bagi wisatawan yang mengunjungi wilayah tertentu.

Ketiga faktor di atas mempunyai implikasi yang signifikan bagi pengembangan fisik suatu kawasan. koordinasi organisasi pariwisata juga diperlukan dalam pengembangan fisik di suatu kawasan disamping administrasi dan diperlukan untuk mewujudkan pariwisata yang profesional dan menjamin wisatawan merasa puas dengan kunjungan mereka. Terkadang terdapat destinasi wisata di suatu daerah yang memiliki potensi luar biasa, namun tidak dikelola dengan baik oleh organisasi pariwisata ataupun pemerintah, sehingga menyebabkan destinasi pariwisata tersebut menjadi kurang menarik bagi

⁹Oka A. Yoeti. 2001. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa. Hlm 187.

wisatawan dan kurang memberikan manfaat bagi daerah tersebut sebagai destinasi wisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan penting dalam menata seluruh potensi dan sumber daya daerah, memastikan bahwa angan-angan industri pariwisata sebagai katalis pembangunan daerah dapat terealisasi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terpenuhi.

Menurut Burkard & Medik dalam Oka A. Yoeti¹⁰, tanggung jawab utama organisasi wisata meliputi:

- a. Mengembangkan dan merencanakan strategi pemasaran wisata untuk wilayah tersebut dengan menyatukan segenap *stakeholder* yang terjun langsung dalam operasi pariwisata di wilayah tersebut untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan perencanaan.
- b. Menghadiri pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pembangunan pariwisata, baik di dalam negeri maupun kancah internasional, atas nama daerah.
- c. Mendorong pengembangan sarana dan keunggulan pelayanan yang sesuai dengan preferensi pengunjung dari berbagai segmen pasar.
- d. Mengembangkan strategi pemasaran melalui pembuatan paket perjalanan yang menarik melalui kerja sama dengan perantara, peningkatan kualitas pelayanan, dan sosialisasi secara berkala kepada wisatawan.

¹⁰*Ibid* hlm 188

Teori peran pemerintah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tugas – tugas tiap aktor dalam kerangka *Governance* dalam melakukan pengelolaan pariwisata berbasis CBT sesuai dengan perannya. Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator dalam pengelolaan pariwisata.

1.5.2.3 Pengelolaan Pariwisata Community Based Tourism

Menurut Suwarno, sebagaimana dikutip oleh Argyo Demartoto, manajemen pariwisata adalah proses pengaturan atau pengelolaan bermacam-macam sumber daya secara efektif guna meraih tujuan¹¹. Menurut Argo Demartoto, proses pengelolaan pariwisata mempunyai dua bentuk pengelolaan yaitu *Community Based Tourism* atau CBT dan Pengelolaan Pariwisata *Top Down*. Pengelolaan pariwisata berlandas masyarakat didasarkan pada konsep kesepadanan dan kesesuaian antara keperluan para pemangku kepentingan dalam lingkup pengembangan pariwisata, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) dalam bentuknya yang ideal, mendorong pengembangan pariwisata dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat sekitar harus berperan serta secara aktif dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam semua tahapan pembangunan, mulai kegiatan merencanakan, membangun, mengelola, mengembangkan, dan monitoring, serta melakukan

¹¹Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 57.

penilaian. Hal tersebut dikarenakan tujuan akhir yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar¹².

Sebagai pemain utama dalam pembangunan *Community Based Tourism*, masyarakat terlibat dalam semua tahap pembangunan, dimana masyarakat bertindak sebagai evaluator, investor, pelaksana, pemantau, pengelola, dan sekaligus perencana. Meskipun pengembangan pariwisata berlandaskan masyarakat mengutamakan pertimbangan masyarakat, hal itu juga membutuhkan kolaborasi dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan sektor swasta. Keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu wilayah akan ditentukan oleh masyarakat setempat atau oleh individu-individu yang bertempat tinggal di dekat tempat-tempat wisata tersebut.

Menurut Isnaini Mualissin yang dikutip Suryo Sakti Hadiwijoyo¹³, ada banyak konsep pariwisata berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai *tool of community development* baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah, diantaranya:

1. Mengakui, menjunjung, dan memasarkan bisnis wisata yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat setempat;
2. Menyertakan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan sedari awal;
3. Memasarkan sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat;
4. Meningkatkan taraf hidup orang banyak;
5. Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari ekosistem;

¹²Argyo Demartoto. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS Press, hlm. 20.

¹³*Ibid* hlm 72

6. Melestarikan karakter dan budaya khas daerah;
7. Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang pertukaran budaya lintas wilayah, bahkan antar negara (*cross cultural learning*);
8. Penghormatan terhadap keragaman budaya dan martabat seorang individu;
9. Membagikan profit dengan adil dan merata ke seluruh anggota masyarakat;
10. Menyumbang sebagian profit yang telah ditetapkan bagi *income* rencana pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat.

Adanya *tool of community development* bagi masyarakat lokal ini dapat dilihat seberapa jauh peran *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta (investor) dan terutama masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata, dominasi peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata harus menjadi prioritas paling utama, terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan swasta (investor).

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengelolaan pariwisata model ini menjadi elemen utama, karena stakeholder utama atau pokok dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatakan Diana Conyers yang dikutip Suryo Sakti Hadiwijoyo¹⁴ mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat sangat penting karena berbagai alasan, yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

¹⁴Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 18-19.

Keterlibatan masyarakat adalah metode untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan, kebutuhan, dan tindakan masyarakat setempat, merupakan hal yang penting untuk mewujudkan program pembangunan yang berhasil. Apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap langkah atau proses, dimulai dengan perencanaan dan berlanjut melalui pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan, masyarakat akan lebih percaya pada program pembangunan. Sebagai konsekuensinya, masyarakat akan menjadi tahu seluk beluk program dan merasakan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap program tersebut. Partisipasi dalam pengembangan komunitas sendiri termasuk hak demokratis. Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dan perencanaan jenis pembangunan yang akan berlangsung di lingkungannya.

Dalam penelitian ini, teori bentuk pengelolaan pariwisata dan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata *Community Based Tourism* akan digunakan sebagai landasan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti mengenai pengelolaan objek wisata Mangrove Demang Gedi di Kabupaten Purworejo. Pemilihan teori pengelolaan pariwisata CBT dalam penelitian ini adalah karena bentuk pengelolaan pariwisata CBT lebih menekankan aspek masyarakat sebagai obyek utama pembuat keputusan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan pariwisata CBT secara lebih kompleks dalam penelitian ini.

1.5.2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi didefinisikan sebagai "mengambil bagian". Hoofsteede berpendapat sebagai berikut: "*Taking part in at least one step of the process,*"

yang berarti partisipasi adalah mengambil bagian dalam setidaknya satu tahapan¹⁵. Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai keinginan untuk berkontribusi pada keberhasilan program apa pun dalam kapasitas yang dimiliki setiap individu tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri¹⁶. Partisipasi dapat diartikan sebagai partisipasi mental/pikiran dan emosi/perasaan individu dalam suasana kelompok yang memotivasi mereka untuk berkontribusi kepada kelompok untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab untuk usaha yang bersangkutan.

Sumardi dalam (Andrean, 2014) mendefinisikan partisipasi sebagai partisipasi individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan/materi, serta partisipasi dalam memanfaatkan dan menghargai hasil proses pembangunan¹⁷. Definisi partisipasi berkaitan erat atau identik dengan keikutsertaan. Pernyataan Keith Davis mendukung pernyataan dari R.A Santoso Sastropoerto¹⁸ yang berpendapat bahwa partisipasi adalah kontribusi pikiran, perasaan, mental, dan moral dalam keadaan kelompok yang memotivasi mereka untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dan bertanggung jawab atas upaya yang telah dilakukan.

¹⁵Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 124

¹⁶Taliziduhu Ndraha. 1987. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara. hlm. 102

¹⁷Nisrina Ariz. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata DAM Margotirto Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung hlm 7

¹⁸Santoso, Sastropoetro. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni hlm 13

Pandangan ini sejalan dengan pandangan Gordon W. Allport¹⁹ yang menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan diri/egonya, yang lebih dari sekadar keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas; dengan keterlibatannya, pikiran dan perasaan seseorang juga disertakan. Seperti yang didefinisikan oleh Habitat²⁰, partisipasi atau peran serta masyarakat adalah upaya mengikutsertakan masyarakat dalam mendefinisikan persoalan dan pencarian solusi terhadap persoalan tersebut.

Konsep partisipasi menurut Soedargo Poerbo Kawatja mengacu pada proses dimana seseorang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan, sekaligus menerima tanggung jawab sesuai dengan kedewasaan dan tingkat tanggung jawabnya. Keterlibatan ini dapat terjadi baik di lingkungan fisik maupun mental, serta dalam proses pembuatan kebijakan publik, tergantung pada situasinya.

Berbicara mengenai definisi masyarakat, kata masyarakat berasal dari bahasa latin yaitu pergaulan. Masyarakat diistilahkan sebagai *socius* dalam bahasa Latin, dan istilah *socius* diubah menjadi istilah sosial yang mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pergaulan hidup²¹. Sosiologi mendefinisikan masyarakat sebagai wadah interaksi sosial manusia yang juga berperan sebagai wadah penyemaian bagi perkembangan kebudayaan manusia sebagai makhluk

¹⁹*Ibid* hlm 12

²⁰Sadono, Y. (2013). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pembangunan wilayah dan kota*. Volume 9, Edisi: Maret

²¹H.M. Daud Ali dan Habibah Daud. 1999. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 77

sosial, menurut pandangan sosiologisnya terhadap masyarakat²². Sebagai hasil dari penjelasan ini, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kesertaan seseorang dalam upaya perumusan persoalan sehingga dapat ditemukan solusi terbaik.

Menurut Aprelia Theresia²³, perluasan dan pengembangan keterlibatan masyarakat dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proyek ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Dengan hadirnya peluang ini berperan sebagai elemen pendorong untuk pengembangan kemauan, yang berujung menjadi penentu kemampuan mereka.
2. Masyarakat telah menunjukkan keinginan untuk mengambil bagian dalam proyek tersebut. Keinginan untuk terlibat ini dipengaruhi oleh perbuatan mental masyarakat terhadap pembangunan atau peningkatan kehidupan mereka.
3. Masyarakat memiliki kemampuan untuk ikut serta. Jika masyarakat sendiri tidak memiliki kemampuan untuk terlibat, kesempatan untuk mengorganisir keterlibatan masyarakat menjadi sia-sia.

Siti Irene (2015) menyatakan bahwa partisipasi dikategorikan menjadi 2 menurut bentuknya, yakni partisipasi secara fisik dan non-fisik. Jika keterlibatan

²²Syafari Imam As'ari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional. , hlm. 32

²³Theresia, A. dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

masyarakat diakui menurut bentuk kegiatannya, Aprilia Theresia²⁴ menyatakan dapat berwujud hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatu dengan kelompok yang lain;
2. Bertukar pikiran dengan individu lainnya;
3. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang akan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk bergabung;
4. Berperan aktif dalam tahapan perumusan kebijakan;
5. Menggunakan hasil kegiatan masyarakat yang telah diraih untuk sesuatu yang bermanfaat.

Istilah "keterlibatan masyarakat" mengacu pada keterlibatan nyata sekelompok orang dalam kegiatan tertentu. Keterlibatan ini dapat berupa ide, kritik yang membangun, dorongan, atau pelaksanaan aktual dari suatu kegiatan atau proyek tertentu. Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai mereka yang berpartisipasi, terlibat, dan diperlakukan sama dalam kegiatan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimulai dari konsep merumuskan kebijakan, melaksanakan program, sampai dengan tahap mengevaluasi (Rubiantoro dan Haryanto, 2013). Dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat penting (Lind & Simmons, 2017).

Pendekatan partisipatif akan memungkinkan diimplementasinya konsep pariwisata berkesinambungan, yang akan mengarah pada sikap positif di masyarakat dengan terbentuknya upaya untuk melindungi sumber daya alam lokal

²⁴*Ibid* hlm 10

dan lingkungan agar tetap lestari (Tosun, 2006). Penduduk yang terlibat dalam pengelolaan dan peningkatan wisata akan menikmati keuntungan berupa meningkatnya kualitas kehidupan wisata dan kelestariannya lingkungan alam tempat mereka tinggal (Nicholas, Thapa & Ko, 2009). Pengembangan desa wisata cenderung memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat lokal, ketika masyarakat mau terlibat dalam proyek pembangunan tersebut (Hermawan, 2016a).

Di samping itu, mereka akan memperoleh keuntungan dari peningkatan kepemilikan, peningkatan pertumbuhan jaringan sosial, dan peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang nilai daerah setempat (Gursoy, Jurowski & Uysal, 2002; Tosun & Timothy, 2003). Tujuan dari keterlibatan masyarakat adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dan bahwa mereka berhak mendapatkan keuntungan dari pengembangan wisata yang telah mereka rencanakan (Tosun, 2000). Dengan demikian, partisipasi masyarakat biasanya dipandang sebagai hal yang esensial selama proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Chok, Macbeth & Warren, 2007). Dalam penelitian ini, teori partisipasi masyarakat akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Hutan Mangrove Demang Gedi yang dikelola menggunakan model CBT.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong²⁵, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti dorongan, persepsi, sikap, tindakan, dan lain-lain dalam konteks khusus, berupa kata-kata dan bahasa, secara holistik dan deskriptif, dengan menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Sementara itu, teknik penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Bog dan Taylor dalam Moleong²⁶, adalah tahap menganalisis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tutur kata ataupun tulisan dari beberapa orang yang diperoleh dari hasil pengamatan perilaku seseorang

Tujuan utama penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni mengilustrasikan dan mengamati (*illustrate and observation*), selanjutnya adalah mengilustrasikan dan menegaskan (*illustrate and emphasize*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara untuk menjelaskan hubungan antara kejadian dan makna²⁷. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menulis dengan cara menggambarkan secara naratif suatu objek atau fenomena. Penulis mengumpulkan data dan fakta dalam bentuk kata-kata, potret, atau dokumen yang menyertakan cuplikan dari informasi faktual yang diungkapkan di tempat pencatatan, dan kemudian penulis menyerukan sketsa utuh untuk mendukung data yang diperoleh.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana pengelolaan obyek wisata Mangrove

²⁵Lexy Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hlm 6

²⁶*Ibid* hlm 4

²⁷M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: al-Ruzz Media, hlm 29.

Demang Gedi sebagai bentuk pengelolaan pariwisata CBT di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran masing – masing aktor dalam pengelolaan obyek wisata berbasis CBT. Serta bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan pariwisata yang diterapkan.

1.6.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “*Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Pariwisata Mangrove Demang Gedi di Kabupaten Purworejo”. Agar arah penelitian menjadi lebih jelas dan pelaksanaan penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka fokus penelitian adalah pengelolaan Desa Wisata Gedangan yang pengelolaannya dilakukan berbasis CBT. Serta ruang lingkup penelitian ini memfokuskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata tersebut, bagaimana peran masing-masing aktor dalam pengelolaannya utamanya peran masyarakat lokal dan pemerintah daerahnya, serta hasil dari pengelolaan pariwisata berbasis CBT ini manfaat apa yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat di sekitar obyek wisata Mangrove Demang Gedi.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan penelitian. Adapun lokasi peneliti melakukan penelitiannya bertempat di Kabupaten Purworejo, terutama di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, serta di obyek wisata Mangrove Demang Gedi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak obyek wisata unggulan

serta sedang dalam upaya mengembangkan pariwisata daerahnya melalui program Romansa Purworejo. Obyek wisata Mangrove Demang Gedi dipilih karena kawasan dan kewenangan pengelolaan pariwisatanya dilakukan oleh masyarakat, tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga sesuai dengan ciri bentuk pengelolaan pariwisata CBT. Selain itu visi Bupati Purworejo yang berkaitan dengan peningkatan pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah juga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

1.6.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang disebut juga sebagai informan adalah individu yang dapat memberikan keterangan secara jelas mengenai keadaan dan suasana terkait topik yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2012:97). Dalam penelitian kualitatif, informan mengacu pada teknik yang dimanfaatkan peneliti dalam memperoleh data atau informasi²⁸. Jadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menurut peneliti memiliki pengetahuan tentang pengurusan bentuk pariwisata *Community Based Tourism* di Kabupaten Purworejo, dan yang bersedia berbagi ilmunya. Dalam penelitian ini, strategi pengambilan informan dilakukan berdasarkan dua cara yaitu:

1. Prosedur Purposif

Dalam memilih informan dalam penelitian kualitatif, metode purposif adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan. Hal ini melibatkan penentuan sekelompok partisipan yang akan bertindak sebagai informan

²⁸ Burhan, Bungin. 2014. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group hlm 107

berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan permasalahan penelitian²⁹. Penguasaan informasi dari informan merupakan kunci utama dalam menggunakan metode ini, dan secara logis bahwa tokoh-tokoh penting di dalam proses sosial harus selalu memiliki akses langsung ke informasi terkait peristiwa yang terjadi adalah hal yang wajar.

2. Prosedur Snowball

Dalam proses ini, sangat penting bahwa orang yang menghubungi partisipan atau informan pertama kali bertemu dengan peneliti memanfaatkan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada individu lain yang mungkin terlibat, berkontribusi, belajar, atau memberikan informasi kepada peneliti³⁰. Peneliti memanfaatkan metode *snowball* untuk mendapatkan informasi dari “informan tersembunyi” yang tidak dapat dijangkau dengan menggunakan prosedur pengambilan informan lainnya. Dalam penelitian ini, informan berikut akan digunakan:

Tabel 1. 2 Subjek Penelitian

Aktor	Keterangan
Pemerintah	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Jasa Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2. Pemerintah Desa Gedangan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
Masyarakat	1. Unsur masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo 2. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa

²⁹*Ibid* hlm 107

³⁰*Ibid* hlm 108

	Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
--	--

Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

1.6.5 Sumber Data

Data adalah istilah yang mengacu pada atribut-atribut yang berhubungan dengan hal-hal tertentu yang berfungsi menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui metode atau instrumen pengumpulan data. Data kualitatif dapat berwujud frasa deklaratif, uraian, atau penjelasan yang mencakup makna/nilai tertentu yang diperoleh melalui alat penambangan data seperti dokumentasi, interviu, dan lain-lain³¹. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber atau objek yang sedang diamati. Data dapat dikumpulkan langsung dari subjek penelitian atau dari lapangan³². Data primer penelitian ini berupa informasi di lapangan yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan Objek Wisata Mangrove Demang Gedi di Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan informasi terkait objek penelitian yang dilakukan tidak secara langsung, tetapi melalui pemeriksaan dokumentasi

³¹Haris Herdiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm8-10.

³²Moh. Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm57.

dan sumber lain berupa buku, jurnal, surat kabar, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, data sekunder dikumpulkan dari literatur dan berbagai sumber lain seperti kerangka teori dari jurnal dan skripsi, metodologi penelitian, penelitian sebelumnya, profil atau deskripsi umum lokasi penelitian, statistik kunjungan wisatawan, dan sumber lain yang mendukung topik penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Dilansir dari Lofland dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* yang ditulis oleh Lexy Moleong³³ menyatakan bahwa kata-kata dan perilaku adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, dengan dokumentasi dan bentuk informasi lain yang berfungsi sebagai pelengkap. Sesuai dengan pernyataan tersebut dan sumber data peneliti, peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara adalah diskusi untuk mencapai tujuan³⁴ Seperti yang ditekankan Lincoln dan Guba dalam Moleong³⁵, tujuan melakukan wawancara antara lain adalah untuk membangun informasi tentang individu, peristiwa, organisasi, emosi, motif, ultimatum, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Peneliti akan memadukan dua metode wawancara yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur akan digunakan untuk

³³Lexy Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hlm 157.

³⁴*Ibid* hlm 186

³⁵*Ibid* hlm 186

memastikan keterlibatan pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan pemerintah desa Gedangan dalam mengelola objek wisata yang berlokasi di Mangrove Demang Gedi.

Selanjutnya wawancara semi terstruktur akan dilakukan kepada masyarakat lokal yaitu kepada tokoh masyarakat dan ketua BUMDes Demang Gedi Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi di sekitar objek wisata Mangrove Demang Gedi. Jenis wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pernyataan secara lebih terbuka dengan menanyakan argumen dan ide orang yang diwawancarai. Ini adalah kategori wawancara yang lebih mendalam yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam pelaksanaannya daripada wawancara terstruktur.

2. Studi Dokumentasi

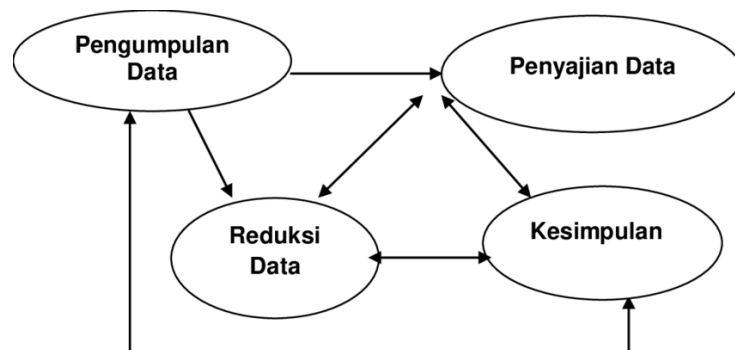
Teknik pengumpulan data ini menghasilkan ulasan kritis terkait permasalahan penelitian, memungkinkan pengumpulan data secara lengkap, terbukti kebenarannya, dan tidak menduga-duga³⁶ Penggunaan metode ini bertujuan untuk menghimpun data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara yaitu berupa foto, rekaman, video, catatan – catatan dan data – data statistika yang mendukung sebagai bahan validitas penelitian.

³⁶Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta Hlm 158

1.6.7 Teknik Analisis Data

Dilansir dari Bogdan dan Biklen dalam Moleong³⁷, bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat diproses, mensintesiskannya, melakukan pencarian dan menemukan pola, memilih apa yang penting dan perlu ditelaah lebih lanjut, dan menentukan jenis informasi apa yang dapat diberikan kepada individu adalah bagian dari analisis data kualitatif. Sementara itu, Patton mendefinisikan analisis data sebagai tindakan menyusun urutan data dan mengkategorikannya³⁸. Pada umumnya, analisis data berkaitan dengan pengorganisasian data. Catatan lapangan dan keterangan peneliti, foto, potret, dan dokumentasi berupa artikel, profil, warta, dan lain-lain.

Gambar 1. 2 Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Analisis Data Miles & Huberman, 2019

Sejalan dengan metodologi analisis data model interaktif Miles dan Huberman, gambar di atas menggambarkan salah satu dari 4 tahapan analisis data penelitian yang meliputi: kegiatan menghimpun data, mereduksi data, menyuguhkan data, dan mengambil kesimpulan.

³⁷Lexy Moleong Op,cit hlm 248

³⁸*Ibid* hlm 280

1. Pengumpulan Data

Data dari interview, pengamatan, dan beragam dokumentasi yang berbeda diklasifikasikan menurut masalah penelitian dan digunakan dalam analisis model awal, dan data selanjutnya disempurnakan dengan penelusuran informasi tambahan.

2. Reduksi Data

Teknik analisis yang dikenal dengan reduksi data adalah metode untuk mempertajam dan mengkategorikan data, serta menuntun dan menyingkirkan informasi yang berlebihan, serta mengelola informasi sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data, menurut Mantja³⁹, terjadi tanpa henti selama proyek penelitian belum dinyatakan berakhir. Hasil akhir yang dicapai berupa rangkuman yang diperoleh dari keterangan di lapangan, termasuk catatan permulaan, perbanyakan, dan tambahan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan seperangkat teknik pengorganisasian data yang mendorong peneliti untuk menarik simpulan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penyajian data adalah untuk mengidentifikasi pola yang signifikan dan memberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan

³⁹Harsono, 2008. *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 169

yang sesuai⁴⁰ Menurut Sutopo⁴¹, data disajikan dalam bentuk kalimat narasi, jaringan kerja, skema/gambar, dan tabel, yang semuanya tergolong narasi.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah elemen penting dari keseluruhan proses penyiapan⁴². Selama penelitian berlangsung, kesimpulan juga dilakukan pemeriksaan ulang. Kesimpulan terbentuk karena peneliti menghasilkan arah sebab akibat, catatan, ide/pemikiran baru, konfigurasi, proposisi yang berbeda, dan suatu pola yang kesemuanya dianalisis dan ditafsirkan oleh objek yang diteliti.

Sesuai dengan uraian di atas tentang metode analisis data, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penggunaan metode analisis data penelitian ini terbagi atas 4 tahapan, yakni kegiatan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memudahkan dalam menelaah data yang dikumpulkan dari interviu, studi dokumentasi, temuan penelitian di lapangan, untuk menarik kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan.

1.6.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan untuk memverifikasi keaslian data. Triangulasi menurut Lexy J. Moleong (2012:330), adalah suatu

⁴⁰Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia hlm 84

⁴¹Harsono Op,Cit hlm 169

⁴²Miles, Matthew B dan Amichael Huberman Op,Cit hlm 18

metode untuk menentukan validitas suatu data dengan memanfaatkan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan verifikasi atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) mengidentifikasi 4 jenis triangulasi sebagai metode pemeriksaan data yang menggunakan pemanfaatan sumber, teori, teknik, dan pengusut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik verifikasi keaslian data triangulasi sumber dan metode. Istilah "triangulasi dengan sumber" mengacu pada proses pembandingan dan pemeriksaan kembali tingkat keaslian data yang diperoleh melalui berbagai periode waktu dan instrumen penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330). Teknik triangulasi merujuk pada pernyataan Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330), meliputi 2 strategi, antara lain: (1) menentukan tingkat kebenaran terhadap temuan penelitian yang berasal dari berbagai metode menghimpun informasi, dan (2) menentukan tingkat keyakinan sebagian data menggunakan teknik yang sejenis.

Penggunaan metode triangulasi dengan sumber dilakukan peneliti dengan cara melakukan perbandingan perolehan hasil interviu terhadap setiap narasumber atau partisipan penelitian dengan tujuan memastikan kebenaran informasi yang diterima. Di samping itu, peneliti juga memvalidasi tingkat kebenaran menggunakan metode triangulasi dengan metode melalui pemeriksaan ulang hasil penelitian dengan data yang terkumpul diperoleh dari dari variasi metode penghimpun data yang beraneka ragam, termasuk interviu, pengamatan, dan

dokumentasi untuk memastikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap data adalah valid.